



INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP  
Open Budgets. Transform Lives.

Mei - Juni 2014 78

## Menempuh Jalan Tol untuk Layanan Lokal

[Cara Kerala Memanfaatkan Internet untuk Melokalisasikan Penyediaan Layanan Publik bagi Masyarakat](#)

## Inisiatif Perubahan

[Hentikan Kontrak Rahasia: Tautan yang Hilang dalam Agenda Transparansi](#)

[Audit Publik: Bagaimana Pengawasan Mampu Menghasilkan Perubahan Selamanya?](#)

## Dari Laporan Tahunan: Apa yang Telah Kita Pelajari Mengenai Penggunaan Anggaran untuk Mengubah Kehidupan?

[Bagaimana Organisasi Masyarakat Sipil Dapat Bergabung dengan Lainnya dalam Ekosistem Pertanggungjawaban agar Lebih Berdampak?](#)

[Apa yang Telah Kita Pelajari Mengenai Bagaimana Masyarakat Sipil Bergerak dari Transparansi Menuju Advokasi Anggaran yang Berpusat pada Layanan?](#)

## Sudut Blog

[Tampilan informasi terbaru dari Blog \*Open Budgets\*](#)

## Publikasi

[Publikasi IBP](#)

### Baru Dirilis! Buku Pedoman Mengenai Implikasi Anggaran Pasal 2 dari Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Proyek Pasal 2 ini, dalam kerjasama antara organisasi masyarakat sipil, telah menyusun sebuah buku pedoman yang secara rinci menjabarkan bagaimana anggaran pemerintah harus membantu mewujudkan hak-hak azasi manusia. Buku pedoman ini berfokus pada pekerjaan anggaran masyarakat sipil dan menelusuri bagaimana pemerintah berkomitmen menurut Pasal 2 dari Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya untuk "mencapai [hak-hak azasi manusia] secara progresif, "untuk memaksimalkan semua sumber dayanya yang tersedia," dan "tanpa diskriminasi", dan pasal ini harus memandu cara pemerintah dalam menggalang, mengalokasikan dan membelanjakan dana publik. Buku pedoman ini merupakan sumber bahan bagi berbagai organisasi masyarakat sipil, komisi hak azasi manusia, dan bahkan legislator untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kewajiban hak-hak azasi mereka. [Buku pedoman ini tersedia di situs web IBP.](#)

### Selamat Datang, Anggota Staf Baru IBP!

IBP terus berkembang dengan hadirnya Opare Densua, Petugas Hutang Usaha & Spesialis Pembayaran Gaji! Dalam peranan barunya, Opare bertanggung jawab atas fungsi hutang usaha dan pembayaran gaji untuk staf dan konsultan internasional IBP. Sebelum bergabung dengan IBP, Opare menangani keuangan dan administrasi beberapa kontraktor bangunan komersil di wilayah Washington, D.C.

Jalin Hubungan  
dengan IBP



[Bacaan Lebih Lanjut dari Bidang ini](#)

## Lowongan Pekerjaan

[Tiga Lowongan Pekerjaan di IBP](#)

## Menempuh Jalan Tol untuk Layanan Lokal

### Cara Kerala Memanfaatkan Internet untuk Melokalisasikan Penyediaan Layanan Publik bagi Masyarakat, oleh Tina Karippacheril, Bank Dunia

Ini adalah ringkasan tampilan pesan yang pertama kali tercantum di blog *Tata Kelola* milik Bank Dunia, yang [tersedia di sini](#).



Salah satu tanggung jawab inti pemerintah adalah menyediakan layanan berikut secara efektif, misal pendidikan dan perawatan kesehatan bagi warga negaranya, di samping menyediakan kemudahan akses ke layanan-layanan yang disediakan pemerintah. Penyediaan layanan yang efektif bergantung pada alokasi dana publik yang semestinya dan memastikan dapat menjangkau mereka yang pantas menerimanya. Di India, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan penyediaan layanan maupun aksesibilitas layanan untuk "warga biasa" di tempat lokal warga itu.

Program *National e-Governance Program* (NeGP/Tata Kelola Nasional Secara Elektronik) adalah program senilai US\$9 miliar yang diadakan oleh pemerintah India. Program ini berupaya meningkatkan efisiensi, kesetaraan, dan

transparansi penyediaan layanan dengan cara meringankan beban kunjungan fisik ke badan-badan berlainan, dengan menyediakan akses setiap saat ke informasi, membatasi kebijakan pejabat, dan menghambat kebocoran dan korupsi. Dalam konteks ini adalah program negara bagian Akshaya di Kerala, yaitu sebuah kemitraan antara pemerintah dan swasta untuk mendirikan pusat-pusat layanan bagi warga negara. Pada tahap pertama, program Akshaya dirancang untuk meningkatkan kemampuan penggunaan komputer di daerah-daerah yang kurang mendapatkan layanan. Sedangkan pada tahap ke dua, adalah menyediakan kebijakan untuk layanan dari pemerintah bagi warga negara (misalnya: pengajuan pajak perdagangan, mengajukan permohonan kartu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang-barang yang dijajah (*ration card*), pendaftaran asuransi kesehatan, dan sebagainya). Lebih dari 60% dari 33 juta warga negara Kerala telah dilayani oleh lebih dari 2.070 pusat di Akshaya yang dikelola oleh para pengusaha swasta.

**Pusat-pusat di Akshaya ini telah melahirkan perubahan besar bagi hak-hak warga negara untuk mendapatkan layanan. Inilah caranya:**

- **Transparansi:** transparansi dan pertanggungjawaban telah mengalami peningkatan besar-besaran karena semua proses dapat dilihat dan semua informasi dapat diakses secara *online*.
- **Pertanggungjawaban:** nomor kasus permohonan memudahkan pelacakan dan pemantauan permintaan layanan.
- **Tata kelola dan anti korupsi:** sistem pembayaran secara elektronik menyediakan kerangka kerja untuk melancarkan penanganan uang tunai dan mencegah korupsi.
- **Memperkenalkan teknologi informasi:** sebagian masyarakat menyatakan bahwa program-program tata kelola secara elektronik adalah bukan untuk massa, karena tidak semua orang memiliki akses ke Internet atau tidak mampu membayar Internet melalui komputer atau perangkat bergerak pribadi. Kunjungan ke sebuah pusat di Akshaya menekankan bahwa mengalokasikan

pusat-pusat penyediaan layanan secara lebih dekat ke warga negara akan mampu menyelesaikan masalah ini.

### **Bagaimana kita dapat menggunakan model penyediaan layanan tata kelola secara elektronik Kerala ini dalam berbagai konteks lain?**

- Desain yang berpusat pada warga negara: masyarakat yang berusaha mendapatkan layanan seringkali harus menggabungkan tugas *online* maupun bukan *online*, sehingga membuat prosesnya terlalu rumit. Dengan memetakan bagaimana masyarakat menjalani seluruh proses ini, termasuk mengukur kerumitan pengambilan keputusan kantor belakang (*back office*) dan tingkat penolakan permohonan, proses pemerintah bisa lebih berpusat pada warga negara.
- Badan-badan dan/atau layanan mandiri: warga biasa mungkin tidak terbiasa atau merasa tidak nyaman dalam mengajukan permohonan layanan publik yang mereka butuhkan dan mereka akses. Dengan biaya rendah, pusat-pusat layanan warga negara mampu menyediakan ruang yang terpercaya bagi badan-badan berlisensi dalam masyarakat untuk membantu warga negara menavigasi proses tersebut.
- Menggunakan Internet untuk desentralisasi: bahwa Internet mampu mendesentralisasikan informasi dan berpotensi mendistribusikan ulang kekuasaan dari lembaga kepada warga negara, ini adalah gagasan yang luar biasa. Ketika merancang layanan pemerintah yang menggunakan Internet sebagai tulang punggung untuk informasi dan penyediaan layanan, mengingat gagasan ini sungguh bermanfaat.

Meskipun sebagian kalangan mungkin masih meragukan peningkatan pusat-pusat warga negara dan cara yang terbaik untuk melangkah maju, model Kerala untuk menyediakan layanan bagi warga negara ini berpotensi meningkatkan kehidupan warga negara Kerala, dan bahkan mungkin warga negara di luar Kerala.

## Inisiatif Perubahan

### **Hentikan Kontrak Rahasia (*Stop Secret Contracts*): Tautan yang Hilang dalam Agenda Transparansi**, oleh Theodora Middleton, *Open Knowledge Foundation*

Secara global, pemerintah di seluruh dunia menghabiskan lebih dari US\$9,5 triliun untuk barang dan jasa melalui berbagai kontrak publik. Mendapatkan informasi yang baik mengenai semua kontrak ini terkenal sulit. Bahkan dalam pemerintahan dengan akses yang sangat kuat ke perlindungan informasi, kontrak dengan sektor swasta seringkali kebal terhadap pengawasan. [Hentikan Kontrak Rahasia](#) yakin bahwa kita membutuhkan komitmen yang serius terhadap transparansi kontrak dari pemerintah di seluruh dunia jika agenda pemerintahan terbuka harus benar-benar ditekankan. Hentikan Kontrak Rahasia dikoordinasi oleh [Open Knowledge Foundation](#) dan didukung oleh berbagai organisasi masyarakat sipil (termasuk *International Budget Partnership*) dari seluruh penjuru dunia. Tujuan kampanye ini antara lain adalah:

- meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai berbagai masalah seputar kontrak publik yang tidak transparan;
- memperlihatkan lingkup masalahnya dengan cara mengumpulkan, menerbitkan, dan menganalisa informasi yang relevan dari para anggota masyarakat dan mitra baru kami di seluruh dunia; dan
- menggunakan semua tautan kami dalam masyarakat kebijakan kontrak terbuka agar penemuan kami didengar, dengan cara memberikan informasi pada proyek-proyek yang ada maupun yang sedang timbul di samping pertukaran antara data terbuka dengan para pakar dan pemerintahan kontrak terbuka.

Cerita mengenai korupsi dan kesalahan manajemen kontrak tidak sulit diperoleh. Di Nigeria, [sebuah perjanjian rahasia](#) antara pemerintah dan beberapa perusahaan minyak internasional, termasuk Shell dan ENI, telah menyebabkan kerugian sebesar \$1,1 miliar bagi rakyat Nigeria — dan uang sebesar itu sebenarnya bisa digunakan untuk memberikan pendidikan kepada 1,7 juta siswi Nigeria selama lima tahun di negara yang lebih dari lima juta penduduknya tidak mengecap bangku sekolah.

[Menggelembungkan biaya infrastruktur](#) untuk mengadakan ajang Piala Dunia di Brasil sangat jelas memperlihatkan kesalahan besar dalam manajemen kontrak, dan terlihat dengan sangat aneh di sepanjang pemandangan kekurangan dan kemarahan di jalanan kota-kota besar di Brasil. Di seluruh dunia, kerahasiaan kontrak pemerintah menjadi olok-olok bagi komitmen mereka terhadap keterbukaan dan membuat warga negara tidak berdayaguna dan dirampok.

Kontrak membentuk bagian yang berkembang dan amat sangat besar dalam pengadaan layanan pemerintah dan distribusi dana publik, dan selagi isinya tetap tidak dapat diakses, banyak sekali bidang tata kelola yang masih tidak terlihat dari pandangan masyarakat. [Rencana Tindakan Pemerintahan Terbuka](#), yang dibuat oleh pemerintah untuk menjadi penandatanganan [Kemitraan Pemerintahan Terbuka](#), harus berisi komitmen menurut [prinsip Kemitraan Kontrak Terbuka](#) sebagai hal yang sewajarnya terjadi.

Kampanye [Hentikan Kontrak Rahasia](#) ini menyatukan berbagai organisasi masyarakat sipil, para pakar kontrak, dan warga negara yang merasa prihatin untuk menekan pemerintah agar bersikap terbuka dalam praktek pelaksanaan kontrak. Kami yakin bahwa ketika pemerintah menandatangani kontrak atas nama kita, kita berhak membaca rincian kontrak yang ditulis kecil-kecil. [Tanda tangani lah petisi ini hari ini](#) untuk menambahkan suara Anda ke suara orang banyak yang mempercayai transparansi, dan pikirkan bahwa semua kontrak pemerintah harus terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Untuk informasi lebih jauh mengenai kampanye *Hentikan Kontrak Rahasia*, hubungi [contact@stopsecretcontracts.org](mailto:contact@stopsecretcontracts.org).



## **Audit Publik: Bagaimana Pengawasan Menghasilkan Perubahan Selamanya?** oleh Jessica Taylor, *International Budget Partnership*



Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) belum lama ini menerbitkan sekumpulan artikel pendek yang ditulis oleh 12 auditor publik dari seluruh dunia. "[Breaking Out: Public Audit's New Role in a Post-Crash World](#)" mencerminkan peranan lebih luas yang dimiliki berbagai lembaga audit tertinggi (*supreme audit institutions*/SAI) dan menelusuri berbagai macam pendapat mengenai proposisi yang harus dilewati auditor di luar mandat yang sempit dan berkontribusi lebih langsung terhadap peningkatan pertanggungjawaban dan perbaikan kinerja sektor publik.

Laporan ini berisi minimal tiga wawasan signifikan yang patut disoroti.

### **Perusahaan swasta yang menyediakan layanan publik harus menjalani audit rutin.**

Saat ini sektor publik sedang mengalami berbagai perubahan radikal di banyak negara di seluruh dunia. Pemerintah telah terus-menerus memperluas kisaran dan lingkup layanan publik yang disediakan oleh sektor swasta, namun pertanggungjawaban ketiga perusahaan swasta ini masih di bawah standar di banyak tempat. Mengutip ucapan Hodges dan Fawcett dari ACCA, "kontraktor swasta kini bertanggung jawab atas berbagai layanan publik yang signifikan, namun mereka tidak menjalani audit yang sama ketatnya dengan mitra mereka dari sektor publik" (hal.10). Kurangnya pengawasan tersebut menimbulkan sejumlah risiko baru atas kualitas layanan dan menyoroti perlunya semua perusahaan swasta ini untuk menjalani audit kinerja



secara rutin. Namun tantangannya, setiap tahun hampir semua lembaga legislatif telah mendapat laporan audit yang luar biasa banyaknya dan mereka hanya memiliki lingkup kecil untuk mengerjakan lebih banyak hal. Hal ini menyiratkan kemungkinan perlunya perubahan pada mesin legislatif untuk memastikan pengawasan dan pemantauan yang efektif.

### **Kerjasama dan tindak lanjut dapat meningkatkan pelaksanaan rekomendasi**

Satu pertanyaan yang diajukan oleh para auditor di seluruh dunia adalah: Mengapa badan-badan menerima rekomendasi namun tidak berbuat apa-apa? Menurut laporan tersebut, apapun jawabannya, auditor kontemporer mampu dan harus berbuat sesuatu dengan menggunakan pendekatan yang lebih kolaboratif.

- Pertama-tama, auditor harus mendapatkan persetujuan dari badan yang diaudit dengan cara bekerja bersama mereka untuk membuat rekomendasi.
- Kedua, auditor harus berusaha membuat persetujuan yang sangat jelas dari badan tersebut mengenai rekomendasi yang ada beserta jadwal pelaksanaannya.
- Akhirnya, setelah jangka waktu yang idealnya tidak lebih dari setahun, auditor harus melakukan tindak lanjut dengan badan tersebut untuk menilai kemajuan mereka.

Menurut Thomas, Jenderal Auditor dari Wales, "pendekatan kolaboratif terhadap kajian eksternal untuk badan-badan publik ini membantu mengatasi inersia dan penolakan perubahan" (hal.18).

### **Dukungan publik dapat menjadi corong suara bagi audit**

Pendapat publik bisa berperan penting dalam keefektifan audit: sangat tergantung pada seberapa jauh masyarakat bersedia berbicara mengenai kualitas pengambilan keputusan publik. Auditor perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk memperluas pemahaman masyarakat dan mendorong pengakuan bagi SAI sebagai pelaku utama dalam penyediaan layanan. Untuk tujuan ini, SAI harus berupaya menangani kesenjangan antara informasi yang mereka laporkan dan informasi yang diharapkan oleh masyarakat untuk memenuhi rasa tanggung jawab mereka. Hal ini terutama relevan di negara-negara sedang berkembang di mana Muwanga, Jenderal Auditor Uganda, menjelaskan bahwa kian banyaknya protes masyarakat yang berfokus pada masalah penyediaan layanan adalah "menguji audit publik sebagai mekanisme untuk memajukan pertanggungjawaban dan transparansi dalam pemerintahan" (hal.9).

### **Pemikiran akhir**

Tidak peduli apakah Anda menyebutnya "membuat perbedaan," "mendorong pemerintahan yang efektif," atau "mendorong peningkatan lebih luas dalam layanan-layanan publik," hampir semua kontributor kumpulan "*Breaking Out*" sepakat bahwa auditor harus melangkah lebih dari mandat kepastian standar mereka. Bahkan banyak yang sudah melakukannya. Wawasan yang disoroti dalam artikel ini menjelaskan tiga dimensi khusus mengenai kian luasnya peranan auditor dan meluasnya lingkup audit.

## **Dari Laporan Tahunan: Apa yang Telah Kita Pelajari Mengenai Penggunaan Anggaran untuk Mengubah Kehidupan?**

*Bagian berikut ini memuat dua esai dari Laporan Tahunan IBP tahun 2013. Tiga esai lain dari laporan tersebut dimuat dalam edisi buletin bulan [Maret-April](#). Akses ke laporan selengkapnya ada di [sini](#),*

## **Bagaimana Organisasi Masyarakat Sipil Dapat Bergabung dengan Lainnya dalam Ekosistem Pertanggungjawaban agar Lebih Berdampak?**

[Studi kasus](#) yang belum lama ini ditugaskan oleh IBP jelas memperlihatkan bahwa masyarakat sipil mampu memberikan sumbangsih yang signifikan untuk peningkatan tata kelola dan pengentasan kemiskinan di banyak sekali lingkungan negara. Dalam melakukannya, mereka sering membantu

menjembatani kesenjangan antara transparansi dan pertanggungjawaban dengan cara memberikan kompensasi atas kekurangan para pelaku pengawasan resmi dengan cara:

- mengumpulkan, menafsirkan, dan mendistribusikan informasi kepada beberapa pemangku kepentingan dalam berbagai format yang dapat digunakan dan dapat diakses.
- menuntut pertanggungjawaban secara langsung dari pemerintah;
- mendukung dan mendorong para pelaku pengawasan resmi agar menuntut pertanggungjawaban; dan
- mendukung dan mendorong para pelaku lain (misalnya orang dalam di tingkat eksekutif, partai politik, donatur) untuk menuntut pertanggungjawaban.

Kendati pelaku pengawasan bisa memetik manfaat dari keterlibatan organisasi masyarakat sipil (OMS) yang lebih aktif dalam hal proses anggaran, OMS juga bisa mendapatkan keuntungan besar dari kemitraan ini. Analisa IBP mengenai semua studi kasus tersebut mengkonfirmasi bahwa OMS dapat menebarkan dampak yang lebih sering, lebih signifikan dan lebih berkelanjutan bila bekerja sama dengan para pelaku lain dalam sistem pengawasan.



Studi kasus IBP ini memberikan sejumlah contoh yang memperlihatkan bahwa bila OMS bekerja sama dengan media, legislator, SAI, donatur, dan partai politik yang bersedia dan mampu, atau bila pekerjaan mereka diperkuat oleh semua pihak ini, maka roda pertanggungjawaban benar-benar mulai bergerak. Misalnya, dulunya *National Campaign for Dalit Human Rights* (NCDHR) di India hampir tidak berpengaruh ketika berkampanye sendirian untuk menggalang dana bagi masyarakat Dalit yang rentan, yang dananya telah dialihkan oleh pemerintah untuk membangun stadion olah raga. Namun ketika media lokal dan internasional meliput masalah itu dan para legislator oposisi memaksa

mengadakan debat parlemen, Menteri Keuangan segera mengakui kesalahannya dan memastikan akan mengembalikan dana tersebut.

Contoh lain, *Institute for Socioeconomic Studies* (INESC) mendorong Kongres Brasil untuk mengadakan serangkaian acara dengar pendapat di mana saat itu INESC menyajikan bukti yang meyakinkan para penguasa agar menolak reformasi pajak yang akan membuat pendapatan yang dihilangkan menjadi dapat dialokasikan untuk berbagai layanan sosial yang penting. Di Tanzania, televisi HakiElimu "mendeteksi" perumahan guru yang tidak memadai di daerah pedesaan, sehingga menyebabkan serbuan media yang memotivasi pemerintah agar mempercepat penyediaan perumahan. Di Afghanistan, Republik Demokrasi Kongo, dan Honduras, berbagai OMS turut melakukan riset dan advokasi untuk mendukung upaya donatur guna mendorong pemerintah agar bersikap terbuka mengenai anggaran mereka, sehingga akhirnya menyebabkan peningkatan transparansi yang dramatis di tiga negara ini.

Dalam setiap contoh di atas, OMS tidak akan memiliki dampak yang sama bila bertindak sendirian, dan tidak mungkin media atau legislator memperhatikan masalah itu bila OMS tidak berkampanye. Sistem pertanggungjawaban hanya mampu menebarkan pengaruh besar bila berbagai macam pelaku pertanggungjawaban bekerja sama.

Apa arti analisa bagi praktek mendukung pertanggungjawaban anggaran? Pertama-tama, analisa ini membawa kita keluar dari dikotomi penawaran dan permintaan, di mana eksekutif "menawarkan" informasi mengenai cara mereka menangani dana publik secara efisien dan efektif dan kemudian melakukannya, sementara para pelaku lain - yang bekerja dengan cukup terpisah dari satu sama lain - "meminta" pertanggungjawaban melalui mekanisme pengawasan resmi di samping pemantauan dan advokasi tidak resmi. Semua studi kasus kami menunjukkan bahwa pertanggungjawaban anggaran yang efektif adalah tergantung pada sistem interaksi dan tindakan terkoordinasi dalam sistem pengawasan berskala besar: yang meliputi keterlibatan simbiosis oleh legislatif, SAI, peradilan, media, masyarakat sipil, donatur, dan orang-orang dalam yang bersimpati di berbagai lembaga pemerintahan.

Mengetahui cara mendorong keterlibatan terpadu ini tidak meliputi satu model sederhana, terutama karena tingkat pengaruh setiap lembaga atas sistem pengawasan tidak sama di semua negara. Karena itu, studi kasus di setiap negara perlu menganalisa kekuatan relatif yang dimiliki berbagai lembaga dalam hal sistem pengawasan guna mengidentifikasi gabungan lembaga yang paling sesuai yang mampu mengkatalisasi atau mempertahankan pengawasan dan pertanggungjawaban lebih besar dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Semua studi kasus IBP ini memperlihatkan bahwa masyarakat sipil seringkali berperan lebih penting dalam memulai tuntutan pengawasan lebih besar di mana legislatif atau SAI relatif lemah dibanding cabang eksekutif, namun perlu ada kemitraan yang efektif dengan para pelaku pertanggungjawaban lainnya agar tekanan ini menjadi lebih kuat atau berkelanjutan.

Analisa ini memberikan arah untuk generasi IBP selanjutnya di pekerjaan di negara, kini dimulai di Kenya, India, dan Afrika Selatan. Di tiga negara ini, kami akan bekerja sama dengan mitra-mitra dari masyarakat sipil untuk membina kemampuan mereka dalam melakukan analisa anggaran dan advokasi di samping memfasilitasi hubungan dan dialog di antara organisasi masyarakat sipil lainnya, pemerintah, media, dan berbagai pelaku keuangan publik lainnya.

Untuk menanggapi berbagai macam kekuatan dan kelemahan pada pelaku di berbagai negara, selama tiga tahun mendatang, [Program Pembelajaran \(Learning Program\)](#), IBP akan berfokus untuk mengetahui manakah jenis-jenis hubungan antara OMS dan lembaga pengawasan yang melahirkan hasil anggaran yang lebih kuat. Termasuk mengetahui pelaku pertanggungjawaban mana yang lebih cenderung diajak bekerjasama oleh OMS dalam keadaan apa, dan dampak macam apa yang akan dicapai oleh kerjasama tersebut.

Meskipun kesuksesan kampanye OMS sering bergantung pada pelaku lain dalam sistem pertanggungjawaban, kampanyenya sering dimulai ketika OMS sendiri yang menemukan tujuan bersama. Untuk alasan ini, Program Pembelajaran kami juga akan mengamati jenis-jenis hubungan mana antar OMS yang menyebabkan hasil anggaran yang lebih kuat. Penelitian kami sebelumnya memperlihatkan bahwa kampanye, koalisi, dan jaringan OMS sering berperan dalam dampak warga negara terhadap anggaran pemerintah - namun dalam beberapa kasus, terjadi dampak tanpa kampanye atau koalisi. Karena itu, kami akan menelusuri kondisi di mana koalisi dan kampanye berperan atas dampak yang lebih besar, dan jenis-jenis dampak apa yang biasanya ditebarkan oleh koalisi dan kampanye.

## **Apa yang Telah Kita Pelajari Mengenai Bagaimana Masyarakat Sipil Bergerak dari Transparansi Menuju Advokasi Anggaran yang Berpusat pada Layanan?**

Misi IBP adalah anggaran terbuka dan mengubah kehidupan. Meskipun kami memahami kekuatan akses ke informasi anggaran dan peluang berpartisipasi, pada akhirnya kita ingin mengubah kehidupan dengan cara meningkatkan kualitas hidup rakyat miskin. Meskipun kami harus terus-menerus berjuang untuk memastikan akses publik yang vital ke informasi anggaran di semua negara, kami memetik pelajaran dari pengalaman para mitra kami bahwa fokus langsung pada penyediaan layanan juga merupakan rute yang penting bagi kehidupan yang diubah.

Studi kasus kami dipenuhi berbagai contoh OMS yang telah berhasil menangani banyak masalah penyediaan layanan dengan cara berfokus pada masalah anggaran yang menjadi penyebab masalah. Di Afrika Selatan, *Treatment Action Campaign* (Kampanye Aksi Pengobatan) memaksa pemerintah agar mengalokasikan dana bagi obat-obatan antiretroviral, yang bermanfaat bagi lebih dari 6 juta penderita HIV/AIDS. Di India, NCHDR meningkatkan pemantauan pendanaan masyarakat Dalit yang rentan, dengan memaksa pemerintah agar mulai menggunakan kode pengeluaran yang memungkinkan pelacakan pendanaan tersebut. NCDHR menggunakan kode ini untuk mengidentifikasi dan akhirnya mendapatkan kembali dana sebesar US\$150 juta milik masyarakat Dalit yang disalahgunakan untuk Pesta Olahraga Persemakmuran



tahun 2010. Di Ghana, *Social Enterprise Development Foundation* melibatkan berbagai komite penduduk lokal untuk memantau pelaksanaan skema penyediaan makan di sekolah, sehingga menyebabkan peningkatan infrastruktur di pedesaan. Kita tahu bahwa hal ini terjadi, namun rute terbaik apa yang dapat meningkatkan layanan melalui anggaran?

Sampai sekarang, IBP telah menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk membuka anggaran dibanding untuk masalah penyediaan layanan. Hal ini mencerminkan teori kerja kami bahwa warga negara dan lembaga pengawasan memerlukan akses ke informasi anggaran dan kesempatan berpartisipasi sebelum dapat terlibat dengan pemerintah untuk meningkatkan perpajakan dan pengeluaran publik, yang akhirnya akan meningkatkan penyediaan layanan. Misalnya, saat bekerja di lingkungan pertanggungjawaban yang "sulit", biasanya IBP berfokus pada peningkatan transparansi anggaran sebagai langkah pertama dalam membina kemampuan warga negara untuk memantau anggaran, bukannya langsung berusaha mewujudkan pengawasan semacam itu. Namun menurut studi kasus kami, OMS di negara-negara lain sering menempuh rute berbeda ke arah pertanggungjawaban dan peningkatan penyediaan layanan.

Di Cape Town, Afrika Selatan, *Social Justice Coalition* (SJC) dimulai dari kampanye untuk meningkatkan layanan sanitasi bagi salah satu tempat tinggal tidak resmi yang terbesar di kota itu. Keterlibatan perdananya dengan pemerintah kota Cape Town memperlihatkan bahwa pendanaan untuk semua layanan ini amat sangat penting artinya bagi advokasinya. Setelah berjuang sekian lama, pemerintah Cape Town akhirnya bersedia memberikan salinan dokumen keuangan yang dibutuhkan oleh SJC. Berbekal informasi ini, SJC mengadakan audit sosial yang pada akhirnya cukup menekan pemerintah kota itu untuk memulai layanan kebersihan sebesar US\$2,6 juta dan *geotagging* (penambahan informasi posisi data GPS dalam sebuah foto digital) toilet umum untuk memungkinkan perbaikan yang lebih cepat. Di Buenos Aires, Argentina, *Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia* (ACIJ) ingin menggugat pemerintah kota itu karena tidak menyediakan fasilitas TK yang memadai di berbagai lingkungan miskin sebagaimana diwajibkan oleh konstitusi kota tersebut. Seperti SJC, ACIJ berupaya keras untuk memperoleh dokumen anggaran yang diperlukan; namun setelah upayanya berhasil, ACIJ memenangkan kasus itu dan proses penyediaan fasilitas pendidikan bagi lebih dari 8.000 anak dari lingkungan miskin akhirnya dapat dimulai.

Semua contoh ini meliputi unsur-unsur yang tak asing lagi, yakni transparansi anggaran, partisipasi, pertanggungjawaban, dan penyediaan layanan, namun rute yang ditempuh oleh OMS-OMS di sepanjang langkah ini bersifat instruktif. Kisah mereka tidak dimulai dari tuntutan terhadap peningkatan transparansi atau partisipasi, melainkan penyediaan layanan. Kisah SJC dimulai dari sanitasi yang buruk; namun kisah ACIJ dimulai dari fasilitas sekolah yang tidak memadai. Ketika kedua kelompok ini tidak memiliki akses ke informasi tertentu yang mereka perlukan, itulah yang mereka tuntut, bukannya menuntut perbaikan tingkat transparansi secara menyeluruh. SJC mendapatkan kesepakatan penyediaan layanan, faktur, kwitansi, dan laporan inspeksi untuk penyedia layanan sanitasi. ACIJ mendapatkan data pengeluaran yang aktual untuk anggaran infrastruktur sekolah. Jadi semua kampanye ini menempuh rute "pendek" menuju peningkatan penyediaan layanan yang dimulai dari tuntutan penyediaan layanan menjadi keterlibatan pemerintah, kemudian menjadi tuntutan transparansi yang sangat spesifik, dan pada akhirnya menjadi layanan yang lebih baik.

Memulai advokasi yang berfokus pada layanan adalah berpotensi menghidupkan kelompok-kelompok luas beranggotakan warga negara dengan cara yang tidak dapat dilakukan bila dimulai dari transparansi anggaran. Cara ini juga memungkinkan OMS untuk menciptakan hubungan yang lebih kuat antara warga negara biasa dan membina keahlian teknis yang dibutuhkan untuk terlibat dalam anggaran pemerintah.

Karena tingginya minat warga negara pada kampanye yang luas semacam itu, bahkan penduduk desa yang kurang mengecap pendidikan sekali pun dapat didayagunakan untuk terlibat dengan informasi dan analisa yang dapat dituntut oleh pekerjaan anggaran. Jelas bahwa di negara-negara yang tidak memiliki transparansi anggaran atau ruang untuk berpartisipasi, masalah ini masih menjadi prioritas, dan tingkat transparansi yang lebih tinggi memang memudahkan warga negara untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Di Brasil misalnya, *Institute for Socioeconomic Studies* (INESC) melakukan kampanye melawan reformasi pajak regresif yang mengancam pendanaan banyak sekali layanan sosial. Namun INESC baru mengetahui usulan reformasi pajak itu karena pemerintah Brasil menerbitkan informasi

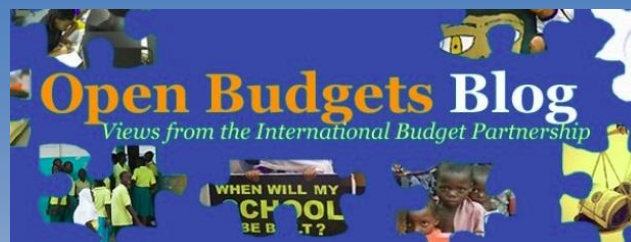


anggaran yang substansial. Dan di Madhya Pradesh, India, Samarthan (sebuah OMS lokal) dapat memantau penyerapan Mahatma Gandhi *National Rural Employment Guarantee Scheme* (MGNREGS) berkat data yang diterbitkan di situs web resmi milik MGNREGS.

Meskipun terdapat contoh-contoh ini, pemerintah yang transparan sering mengeluh bahwa masyarakat tidak menggunakan informasi anggaran yang mereka terbitkan, dan para peneliti berupaya keras untuk menghubungkan perbaikan tingkat transparansi anggaran dengan perbaikan layanan. Tetapi studi kasus kami menunjukkan bahwa kendati akses ke informasi berperan amat sangat penting dalam memungkinkan tuntutan terhadap layanan yang lebih baik, akses ke informasi bukanlah pendorongnya. Pada akhirnya, adalah masyarakat dan lembaga (OMS, legislatif, media, donatur, dan bahkan orang dalam yang memikirkan reformasi) yang menjadi kekuatan pendorong di balik peningkatan penyediaan layanan, bukannya peningkatan transparansi anggaran dan lebih banyak kesempatan berpartisipasi.

Tidak ada hal yang misterius maupun otomatis mengenai kaitan antara transparansi anggaran dengan peningkatan penyediaan layanan - keduanya dibuat oleh warga negara, OMS, dan para mitra pengawasan mereka.

## Sudut Blog



### Dari Blog *Open Budgets*

[Sudut Tersembunyi Keuangan Masyarakat: Di Mana OMS Dapat Melihat, dan Untuk Apa?](#): Akses yang lebih besar ke informasi anggaran membantu masyarakat sipil untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas cara pemerintah menggunakan dana masyarakat. Tapi bagaimana dengan pengeluaran yang tidak terjadi melalui anggaran? Paolo de Renzio dari IBP menelusuri penelitian terbaru IBP mengenai "Sudut Tersembunyi" keuangan masyarakat dan implikasinya untuk organisasi masyarakat sipil.

[Menyingkapkan Data Anggaran di Australia: Kerjasama BudgetAus](#): Belum lama ini, transparansi anggaran meningkat pesat di Australia seiring diterbitkannya data anggaran federal untuk pertama kalinya dalam format yang dapat diproses oleh komputer. Rosie Williams dari InfoAus menjelaskan bahwa sebelum peningkatan tersebut terjadi, beliau membuat situs web BudgetAus untuk memungkinkan analisa data anggaran yang lebih mudah dan lebih baik.

## Publikasi

### Publikasi IBP

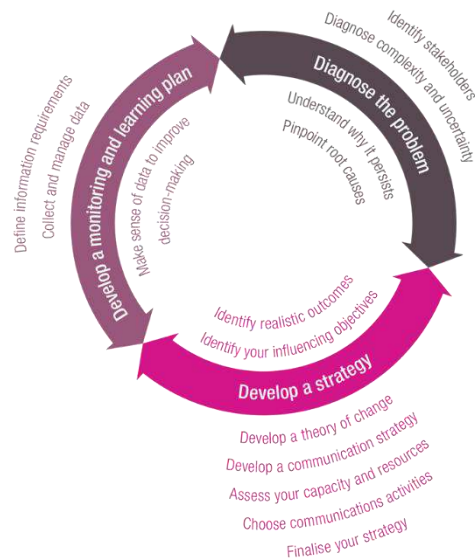
IBP telah menambahkan beberapa publikasi baru di [perpustakaan online!](#)

- [Sudut Tersembunyi Keuangan Masyarakat: Sintesis Studi-studi Kasus Negara yang Melihat Melampaui Anggaran Inti \(A Synthesis of Country Case Studies that Look Beyond the Core Budget\)](#)” menyatukan delapan studi kasus di seluruh dunia yang mengamati pengeluaran publik yang terjadi di luar anggaran inti. Studi kasus yang terkait antara lain adalah:
  - [Transparansi Pelaporan Pengeluaran Pajak di Meksiko](#)
  - [Kegiatan Kuasi-Fiskal di Kroasia](#)
  - [Perusahaan Milik Negara dan Kegiatan Kuasi-Fiskal di Afrika Selatan](#)
  - [Pengeluaran Pajak di Jerman](#)
  - [Transparansi Perusahaan Milik Negara di Korea Selatan](#)
  - [Dana Ekstra Anggaran di Perancis](#)
  - [Perusahaan Milik Negara yang "Canggih" di Brasil](#)
  - [Transparansi Dana Ekstra Anggaran di Rusia](#)
- [Ringkasan Anggaran No. 25 - Pembagian Pendapatan: Berapa Anggaran Kenya yang Sudah Dikomitmenkan dan Tidak Dapat Dibagikan?](#)

Bacaan Lebih Lanjut dari Bidang ini - Liputan relevan mengenai masalah anggaran dan keterlibatan masyarakat sipil dalam penyusunan anggaran masyarakat dari jurnal akademis dan jurnal profesional.

Dalam artikel berjudul “[Thinking and Working Politically in the Transparency and Accountability Field](#),” Brendan Halloran dari *Transparency and Accountability Initiative* berpendapat bahwa "berpikir secara politik hanyalah satu komponen dari pendekatan lebih luas terhadap kontribusi perubahan melalui intervensi berdasarkan informasi politik." Halloran berkata bahwa organisasi-organisasi juga harus "bekerja secara politik" dengan memahami konteks politik di mana mereka berfungsi dan peranan pelaku pendukung pertanggungjawaban.

Belum lama ini, Sheryl Warren Mitchell, calon PhD di Lawrence Technological University, menulis disertasi berjudul “[An Exploratory Study of Priority Based Budgeting: Identification of Public Values and Public Priorities through Citizen Engagement in Government Budgeting Decisions](#) (Penelitian Eksplorasi Mengenai Penyusunan Anggaran Berdasarkan Prioritas: Identifikasi Nilai-nilai Masyarakat Prioritas Masyarakat Melalui Keterlibatan Warga Negara dalam Keputusan Penyusunan Anggaran Pemerintah).” Penelitian kualitatif ini mengamati Penyusunan Anggaran Berdasarkan Prioritas, dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai sarana bagi pemerintah untuk melibatkan warga negara dalam keputusan anggaran.



Belum lama ini *Overseas Development Institute* menerbitkan sebuah pedoman baru untuk memupuk perubahan kebijakan yang berkelanjutan. Berdasarkan penelitian selama sepuluh tahun, ROMA – yaitu [RAPID Outcome Mapping Approach](#) – dirancang untuk membantu organisasi masyarakat sipil agar

meningkatkan pengaruh kebijakan mereka. ROMA terdiri dari serangkaian alat untuk menganalisa cara mendiagnosa masalah, menetapkan tujuan, dan mengevaluasi kemajuan yang dicapai.

## Lowongan Pekerjaan

### Tiga Lowongan Pekerjaan di IBP

- [Asisten Penelitian](#) – *Open Budget Initiative*: IBP mencari seorang asisten penelitian untuk *Open Budget Survey* bersama tim yang terdiri dari para pakar anggaran internasional.
- [Petugas Bidang Program \(Afrika Selatan\) – Program Katalis](#): IBP mencari seorang petugas bidang program di Afrika Selatan untuk bergabung dengan tim Program Katalis. Petugas Bidang Program akan mewakili IBP dan menangani inisiatif Katalis di Afrika Selatan.
- [Petugas Bidang Program – \*International Advocacy\* \(Advokasi Internasional\)](#): IBP sedang merekrut seorang petugas bidang program untuk mendukung Program *International Advocacy*. Melalui program ini, IBP berusaha mewujudkan reformasi transparansi anggaran di berbagai negara yang memiliki sistem anggaran terbuka yang paling sedikit di dunia.